

Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

Abdul Aziz

Humaizi

Dinas Kominfo pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Universitas Sumatera Utara (USU), Medan

Email:humaizi@yahoo.com

Abstrak

Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas utama adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan pembinaan pengembangan, humas pimpinan, hubungan kelembagaan dan layanan Komunikasi dan Informatika; melakukan pengkajian dan evaluasi penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika. Pelayanan informasi publik merupakan kegiatan operasional Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyentuh kepentingan masyarakat dan menyentuh kepentingan pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan. Operasional ini akan "memudahkan" Pemerintah di dalam menjalankan fungsinya sebagai pengayom, pengatur dan pendorong kemajuan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara dalam Program Pusat Informasi. Sampel diambil secara purposive sampling sebanyak 27 orang sebagai implementator dalam implementasi Pusat Informasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan tabel tunggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Pusat Informasi Publik pada Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara dilihat dari input, proses, output dan out comes kebijakan Pusat Informasi Publik, secara umum telah berjalan dengan baik, namun apabila dilihat dari masing-masing variabel kebijakan menunjukkan adanya perbedaan dalam keberhasilan implementasi Pusat Informasi Publik tersebut. Dilihat dari **Input**, yaitu sumber daya - sumber daya yang digunakan dalam implementasi Pusat Informasi Publik (SDM, teknologi, keuangan, sarana dan prasarana) sebagai ujung tombak dalam proses administrasi maupun organisasi pelaksana belum memadai. Dilihat dari **Proses**, masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antara aktor yakni komunikasi terutama antar instansi terkait sebagai pelaksana dengan pengguna baik instansi pemerintah kabupaten/kota, pengusaha dan masyarakat. Dilihat dari **Output**, yaitu keluaran yang dihasilkan langsung dari proses kebijakan Pusat Informasi Publik, baru berupa pelayanan informasi yang bersifat : publish, belum dapat bersifat interaksi dan transaksi. Dilihat dari **Out comes**, yaitu hasil yang diharapkan telah memberikan manfaat terutama dalam memfasilitasi dan menyajikan bahan-bahan yang diperoleh dari Devisi News Room, Devisi Audio Visual, Devisi Media On-line dan Devisi Media Cetak kepada masyarakat pengguna. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi Kebijakan Pusat Informasi Publik pada Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara adalah faktor politik, kelembagaan dan perkembangan teknologi. Dengan adanya kebijakan desentralisasi, maka pengelolaan informasi publik telah mengalami pergeseran dari pusat kepada daerah, yang secara nyata berdampak terhadap kelembagaan dalam pengelolaan informasi di daerah. Perkembangan teknologi telah membawa kemajuan utama dalam pengolahan dan transfer data, telekomunikasi, *paperless office*, automasi proses produksi/kerja dan media elektronik.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pusat Informasi Publik.

Abstract

Communications and Information Agency of North Sumatra Provincial Government has the main task is to prepare the materials for the formulation of technical policy in the sphere of Information and

Communication, organized a coaching development, public relations managers, institutional relationships and service of Communication and Information; review and evaluation of Communication and Information. Public information services are operational activities the Office of Communications and Information Technology that touches the public interest and the interests of government in performing its function as a waiter. These operations will "facilitate" the Government in carrying out its function as a guardian, regulator and driving the advancement of society. This study aimed to analyze the implementation of the policy of the Office of Communications and Information Technology of North Sumatra in the Program Information Center. Sample was taken by purposive sampling as many as 27 people as implementer in the implementation of the Information Center. The data were analyzed with descriptive single table. The results showed that the implementation of the Policy Center at the Department of Public Information Communications and Information Technology of North Sumatra Province visits of input, process, output and comes out policy Public Information Center, has generally been going well, but when seen from each variable indicate a difference in policy successful implementation of the Public Information Center. Judging from the input, ie resources - resources that are used in the implementation of the Public Information Center (human resources, technology, finance, facilities and infrastructure) as a spearhead in the administrative process and the implementing organization was inadequate. Judging from the process, there is still a lack of coordination and communication between the actors, especially communication between relevant agencies as the implementing agencies to the user either district / city governments, employers and society. Judging from the output, ie the output is generated directly from the policy process Public Information Center, a new form of service information that is: publish, can not be interaction and transaction. Judging from Out comes, that the expected results have provided benefits mainly in menfasilitaskan and presenting materials obtained from Division News Room, Audio Visual Division, Division of Media On-line and Print Media Division to the user community. Factors that affect the implementation of Policy on Public Information Center at the Department of Communications and Information Technology, North Sumatra are faktor political, institutional and technological developments. With the decentralization policy, the management of public information has shifted from the center to the regions, which significantly affect the institution in information management in the area. The development of technology has brought major advances in the processing and data transfer, telecommunications, paperless office, automation of the production process / work and electronic media.

Keywords: Policy Implementation, Public Information Center.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh

Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak

banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan

pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; d. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, sebagai salah satu Lembaga teknis yang berada pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempunyai peranan strategis dalam rangka pencapaian tujuan pada Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas utama adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan pembinaan pengembangan, humas pimpinan, hubungan kelembagaan dan layanan Komunikasi dan Informatika; melakukan pengkajian dan evaluasi penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.

Pelayanan informasi publik merupakan operasional KOMINFO yang menyentuh kepentingan masyarakat dan menyentuh kepentingan pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan. Operasional ini akan "memudahkan" Pemerintah di dalam menjalankan fungsinya sebagai pengayom, pengatur dan pendorong kemajuan masyarakat.

Untuk menjalankan pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang mengharapkan informasi yang transparan, akuntabel dan jelas sumber informasinya, institusi KOMINFO harus memanfaatkan sistem jaringan informasi yang terkoordinasi antar institusi. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah dengan membentuk Pusat Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

Keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika akan sangat menentukan keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dalam rangka mencapai keberhasilan tersebut, maka sangat dituntut kinerja yang optimal dari Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut. Kenyataan menunjukkan bahwa kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, belum sepenuhnya dapat memuaskan seluruh stakeholders yang ada. Untuk itu diperlukan suatu kajian atau penelitian lapangan bagaimana sebenarnya kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai unit kerja dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai suatu organisasi bukan hanya tergantung pada

bagaimana organisasi tersebut melaksanakan proses dan aktivitas rutin maupun kondisional dalam suatu kerangka perencanaan strategis. Peningkatan efisiensi dan efektivitas yang mendorong kearah inovasi memerlukan usaha-usaha yang tercantum dengan baik dan terjamin keberkelanjutannya untuk mempertajam arah dan meningkatkan kelayakan kegiatan. Program, maupun kebijaksanaan dalam perspektif satu manajemen strategis (*strategic management*).

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut : “Bagaimana Implementasi Kebijakan Pusat Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara?”

TINJAUAN PUSTAKA
Kebijakan Publik

Kebijakan publik mempunyai pengertian yang variatif tergantung dari siapa yang mengemukakan sehingga tidak dapat digeneralisasikan menjadi suatu pengertian yang representatif memuaskan. Menurut James Anderson (dalam Islamy, 2000:17) mendefinisikan kebijakan adalah “*A Purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (“Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu”).

Menurut pendapat Thomas R. Dye (dalam Islamy, 2000:18) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*Is whatever governments choose to do or not to do*” (“apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”). Dari pendapat ini mengandung pengertian sebagai suatu keputusan untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan, sehingga diam pun bisa dianggap sebagai suatu kebijakan. Selanjutnya Richard Rose (dalam Winarno, 2002:15) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “Serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri.”

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik memiliki ciri-ciri antara lain :

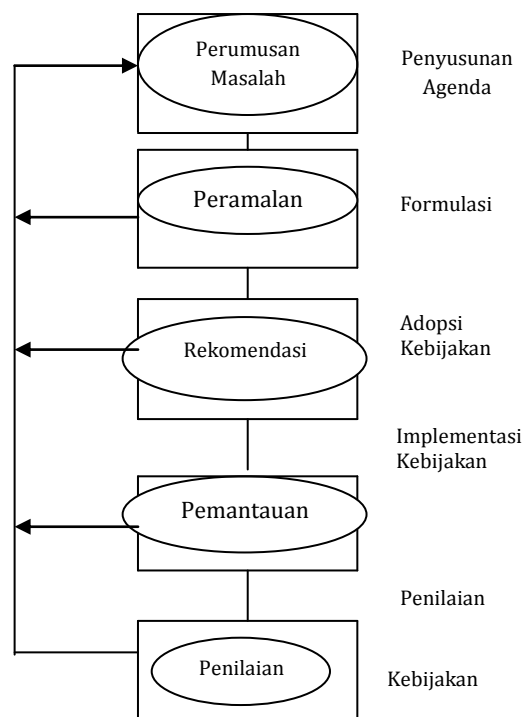
1. Selalu mempunyai tujuan tertentu atau suatu tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Bersifat positif berupa tindakan-tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan suatu keputusan pemerintah untuk tidak melakukan apapun.
3. Serangkaian kegiatan yang tidak berdiri sendiri.
4. Dibuat dan dilakukan oleh pemerintah.
5. Didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.
6. Ditujukan untuk kepentingan umum.

Berkaitan dengan Kebijakan Pusat Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara adalah kebijakan pemerintah di bidang pengaturan tentang keterbukaan informasi publik. Implementasi Kebijakan Pusat Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, dimana dalam pembuatan keputusan tersebut telah melalui tahap-tahap pembuatan kebijakan seperti penyusunan agenda, formulasi kebijakan dan adopsi kebijakan diantara legislatif dan eksekutif.

Menurut William Dunn setiap kebijakan publik mencakup beberapa tahapan yang saling bergantung menurut urutan waktu : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Aktivitas kebijakan yang termasuk dalam prosedur analisis kebijakan seperti yang digambarkan oleh William Dunn di bawah ini :

Gambar 1.

Kedekatan Prosedur Analisis Kebijakan Dengan Tipe-Tipe Pembuatan Kebijakan



Sumber : Dunn, 2003 : 25

Menurut Winarno (2002:17) bahwa, kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik meliputi tiga kegiatan pokok yaitu :

1. Perumusan Kebijakan publik
2. Implementasi kebijakan publik
3. Evaluasi Kebijakan publik

Implementasi Kebijakan

Kata implementasi (*implementation*) berasal dari kata dasar verb *implement*, menurut kamus Oxford-Advanced Learner's Dictionary (1995:595) bahwa *to implement* (*mengimplementasikan*) berarti *to put something into effect* (*menggerakkan sesuatu untuk menimbulkan dampak/akibat*); *to carry something out* (*melaksanakan sesuatu*). Dengan demikian implementasi menurut arti kata harfiah adalah pelaksanaan sesuatu, sehingga implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan suatu kebijakan (keputusan, perda ataupun undang-undang lainnya).

Konsep implementasi kebijakan bervariasi tergantung dari sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses menurut pendapat Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002:102) membatasi implementasi kebijakan sebagai berikut :

“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.”

Dengan demikian pada tahap implementasi kebijakan ini mencakup usaha-usaha mengubah

keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional maupun usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil. Dan tahap implementasi baru terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan.

Namun demikian suatu implementasi kebijakan tidak selalu berhasil adakalanya tujuan tidak tercapai. Suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (*direncanakan*) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai disebut sebagai *implementation gap* (Andrew Dunsire dalam Abdul Wahab, 1997:61). Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak tergantung pada *implementation capacity* dari organisasi/aktor atau kelompok organisasi/aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut (Walter Williams dalam Abdul Wahab, 1997 : 61).

Lebih lanjut Hogwood dan Gunn (dalam Abdul Wahab, 1997:61) membagi pengertian kegagalan kebijakan dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

1. “*Non implementation* (tidak terimplementasikan) mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai persoalan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi.
2. *Unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil) terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor:
 1. Pelaksanaannya jelek (*bad execution*)
 2. Kebijakannya sendiri memang jelek (*bad policy*)
 3. Kebijakan itu sendiri bernasib jelek (*bad luck*)
 4. Sejak awal kebijakan tersebut memang jelek, dalam artian telah dirumuskan secara sembrono, tidak didukung oleh informasi yang memadai, alasan yang

keliru, atau asumsi-asumsi dan harapan-harapan yang tidak realistis.”

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pelaksana implementasi sangat menentukan terimplementasikannya suatu kebijakan sehingga pelaksana implementasi harus benar-benar memahami kebijakan yang akan dilaksanakan. Disamping itu faktor eksternal perlu diperhatikan pula untuk dapat mendukung bagi kelancaran dalam implementasi kebijakan tersebut. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu kebijakan dibuat dan dirumuskan adalah subyek implementasi kebijakan. Dengan demikian untuk mengetahui bagaimana proses Implementasi Kebijakan Pusat Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara merupakan subyek implementasi kebijakan.

Selanjutnya implementasi kebijakan dapat dianalisa dari beberapa pendekatan meliputi pendekatan struktural, pendekatan prosedural, pendekatan manajerial, pendekatan berperilaku dan pendekatan politik seperti yang ditulis oleh Abdul Wahab (1997:111-120). Dalam penelitian ini implementasi kebijakan dianalisa dengan menggunakan pendekatan prosedural. Dilihat dari pendekatan prosedural maka implementasi dipandang sebagai proses prosedural. Pendekatan prosedural menjelaskan implementasi dari proses prosedur yang tepat dijalankan dalam implementasi kebijakan.

Definisi prosedur (procedure) menurut Richard F. Neulschel (dalam Jogiyanto, 2001:1), sebagai berikut : “Suatu prosedur adalah suatu urutan operasi klerikal (tulis menulis), biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi.”

Pendapat yang lain dikemukakan oleh Jerry FitzGerald, Ardra F. FitzGerald dan Warren D. Stallings, Jr., (dalam Jogiyanto, 2001:2) mendefinisikan prosedur sebagai berikut : “Suatu prosedur adalah urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa (what) yang harus dikerjakan, siapa (who) yang mengerjakannya, kapan (when) dikerjakan dan bagaimana (how) mengerjakannya.”

Dengan demikian yang dimaksud prosedur adalah urutan tahapan-tahapan instruksi bagaimana suatu kegiatan dilaksanakan menyangkut pelaksana, waktu, tata cara dan aturan maupun ketentuan yang berlaku yang dijalankan. Dengan demikian implementasi kebijakan yang dimaksud adalah pelaksanaan suatu kebijakan sesuai tatacara, aturan maupun

ketentuan yang berlaku. Dimana yang dimaksud dengan tata cara adalah urutan bagaimana kegiatan dilakukan, aturan adalah hal-hal yang bersifat mengatur sebagai pegangan dalam melaksanakan kegiatan dan ketentuan adalah hal-hal yang bersifat mengikat berkaitan dengan aturan yang ada.

Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan perlu untuk menjelaskan proses implementasi kebijakan. Ada beberapa model implementasi kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian diantaranya yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn.

Dalam hal ini Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002:109) menekankan pada variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan yaitu:

1. Ukuran dasar dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan.
3. Komunikasi antar organisasi kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
4. Karakteristik badan-badan pelaksana.
5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik.
6. Kecenderungan pelaksana.”

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan berguna di dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh, hendaknya dirumuskan dengan jelas agar tujuan dapat tercapai dimana kejelasan rumusan standard dan tujuan kebijakan sangat menentukan kinerja kebijakan dari isi rumusan kebijakan tersebut. Dengan adanya petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang ada dapat menjadi pegangan bagi pelaksana kebijakan sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang sebenarnya.

Sumber-sumber kebijakan atau sumber daya diperlukan untuk mendukung kelancaran implementasi kebijakan secara efektif yang meliputi sumber daya manusia misalnya keahlian, dedikasi, kreatifitas, keaktifan dan sumber daya dana, sarana maupun prasarana. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan menyangkut kejelasan, ketepatan, konsistensi, dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan tersebut sehingga akan memudahkan pelaksana dalam pencapaian tujuan kebijakan. Dengan demikian keberhasilan implementasi memerlukan jalinan komunikasi yang baik. Komunikasi tersebut mencakup baik intern maupun ektern, yakni hubungan didalam lingkungan sistem politik dengan kelompok sasaran maupun antar organisasi.

Karakteristik-karakteristik badan-badan pelaksana menyangkut norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan, yang terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka.

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik, adalah tersedianya sumber daya ekonomi yang dapat mendukung kelancaran implementasi kebijakan dan menyangkut lingkungan sosial dan politik (dukungan elit) yang mempengaruhi yurisdiksi atau organisasi dimana implementasi dilaksanakan. Kecenderungan pelaksana (implementor) menyangkut persepsi-persepsi pelaksana untuk mendukung atau menentang kebijakan. Tanpa adanya persepsi yang sama antara pelaksana dan pembuat keputusan akan menghambat bagi kelancaran implementasi kebijakan.

Dari model yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn maka dapat disimpulkan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk memenuhi ukuran dasar dan tujuan kebijakan, karakteristik, birokrasi pelaksana diperlukan adanya komunikasi yang tepat. Juga diperlukan adanya sumber daya meliputi sumber daya manusia dan sumber dana, sarana maupun prasarana agar kebijakan dapat terimplementasikan. Dan tersedianya sumber daya ekonomi serta lingkungan sosial dan politik yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini mengambil model Van Meter dan Van Horn dengan satu variabel yang diambil yakni kondisi sosial, ekonomi dan politik yang diduga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan pertimbangan variabel kondisi sosial ekonomi dan politik mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian yang ada yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini.

Lebih lanjut Edwards III mengemukakan bahwa empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan yakni komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini juga memakai model implementasi kebijakan dari Edward III dengan mengambil variabel komunikasi dan sumber daya yang diduga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Model Edward III ini hampir mirip dengan model Van Meter dan Van Horn. Dalam model Edward III ini lebih jelas menerangkan

mengenai variabel komunikasi dan sumber daya, dan hal ini sangat relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini dimungkinkan ada hubungan diantara variabel tersebut meliputi komunikasi, sumber daya, kondisi sosial ekonomi dan politik, namun mengingat terbatasnya penelitian hanya meneliti hubungan antara variabel komunikasi, sumber daya kondisi sosial ekonomi politik dengan implementasi kebijakan.

Menurut Rippley(1985:134) bahwa implementasi dapat dilihat dari 2 perspektif, yaitu compliance (kepatuhan) dan *what's happening* (apa yang terjadi). Ditinjau dari Perspektif *what's happening* diasumsikan ada banyak faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan termasuk diantaranya lingkungan. Untuk membatasi ruang lingkup penelitian dan mengarah pada fokus penelitian, dalam penelitian ini menggunakan perspektif *what's happening* meliputi faktor-faktor yang diduga mempengaruhi implementasi.

Penafsiran yang berbeda-beda sering menimbulkan perdebatan. Meskipun demikian, perdebatan ini nantinya justru akan melahirkan suatu program baru yang lebih baik. Sedang proses aplikasinya sering dikatakan merupakan suatu proses yang dinamis dimana para pelaksana dan pemaksa pada umumnya berpedoman pada peraturan-peraturan program atau standar dan realitas yang ada. Dari sudut penafsiran dapat dilihat bahwa proses penafsiran banyak dilakukan oleh badan-badan eksekutif, birokrat, dan beberapa fihak lain yang terlihat dalam menyelenggarakan program-program tertentu. Suatu program dapat berlangsung dengan ditunjukkannya apakah keberadaan penafsiran masih mencukupi atau tidak.

(a) Teori Implementasi Kebijakan

Analisis kebijakan publik merupakan sebuah disiplin ilmu social terapan yang menggunakan berbagai metode kebijakan publik dan argument untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan (Dunn, 1994).

Sedangkan kebijakan publik adalah hal-hal yang berhubungan dengan apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah mengenai masalah-masalah yang sedang dihadapinya (Ripley dan Franklin, 1982). Sementara itu, (Dunn, 1994), Thomas R. Dye (1981), Edward (1980) dan Sharkashy (1971) mengemukakan pengertian kebijakan yang agak mirip dimana kebijakan sebagai tindakan, pilihan dan keputusan baik

yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pencapaian tujuan kebijakan.

Menurut James E. Anderson (1975), "Merumuskan kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan". Jadi konsep kebijakan ini memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan apa yang dimaksudkan dan konsep ini membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pikiran diantara berbagai alternative.

Fredrickson dan Hart (1985) mengatakan :

"Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang disusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan".

Sedangkan komponen-komponen dalam kebijakan tersebut adalah : (1) Kebijakan publik, (2) Tuntutan kebijakan, (3) Keputusan kebijakan, (4) Pertanyaan kebijakan, (5) Hasil kebijakan.

Karena setidaknya ada dua (2) hal mengapa implementasi kebijakan pemerintah memiliki relevansi: (1) Secara praktis akan memberikan masukan bagi pelaksanaan operasional program sehingga dapat dideteksi apakah program telah berjalan sesuai dengan yang telah dirancang serta mendeteksi kemungkinan tujuan kebijakan negative yang ditimbulkan, (2) Memberikan alternative model pelaksanaan program yang lebih efektif.

Berdasarkan pandangan yang diutarakan diatas dapat disimpulkan, bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrative yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat akhirnya berpengaruh terhadap tujuan kebijakan, baik yang negative maupun yang positif.

Dengan demikian secara sederhana tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah (Wibawa et. Al., 1994). Selanjutnya Wibawa et.al., (1994) mengutip pendapat lain bahwa keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa mulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program

telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Kemudian dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan publik ini dikenal dengan beberapa model, antara lain:

1. Model Gogin

Untuk mengimplementasi kebijakan dengan model Goggin ini dapat mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tujuan-tujuan formal pada keseluruhan implementasi, yakni: (1) Bentuk dan isi kebijakan, termasuk didalamnya kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, (2) Kemampuan organisasi dengan segala sumber daya berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif, dan (3) pengaruh lingkungan dari masyarakat dapat berupa karakteristik, motivasi, kecenderungan hubungan antara warga masyarakat, termasuk pola komunikasinya (Goggin et.al., 1990).

2. Model Grindle

Sebagaimana dikutip oleh Wahab (2001) Grindle menciptakan model implementasi sebagai kaitan antara tujuan kebijakan dan hasil-hasilnya, selanjutnya pada model ini hasil kebijakan yang dicapai akan dipengaruhi oleh isi kebijakan yang terdiri dari:

(1) Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi, (2) tipe-tipe manfaat, (3) derajat perubahan yang diharapkan, (4) Letak pengambilan keputusan, (5) Pelaksanaan program, dan (6) Sumber daya yang dilibatkan. Isi sebuah kebijakan akan menunjukkan posisi pengambilan keputusan oleh sejumlah besar pengambilan kebijakan, sebaliknya ada kebijakan tertentu yang lainnya hanya ditentukan oleh sejumlah kecil unit pengambil kebijakan. Pengaruh selanjutnya adalah lingkungan yang terdiri dari: (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat, (2) karakteristik lembaga penguasa, dan (3) kepatuhan dan daya tanggap. Karenanya setiap kebijakan perlu mempertimbangkan konteks atau lingkaran dimana tindakan administrasi dilakukan.

3. Model Meter dan Horn

Model implementasi kebijakan ini dipengaruhi 6 faktor yaitu: (1) Standar kebijakan dan sasaran yang menjalankan rincian tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh, (2) Sumber daya kebijakan berupa dana pendukung implementasi, (3) komunikasi inter organisasi dan kegiatan pengukuran digunakan oleh pelaksana untuk memakai tujuan yang hendak dicapai, (4) karakteristik pelaksanaan, artinya

karakteristik organisasi merupakan faktor krusial yang akan menentukan berhasil tidaknya suatu program,(5) kondisi sosial ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan dan (6) sikap pelaksanaan dalam memahami kebijakan yang akan ditetapkan.

4. Model Deskriptif

William N. Dunn (1994) mengemukakan bahwa model kebijakan dapat diperbandingkan dan dipertimbangkan menurut sejumlah banyak asumsi, yang paling penting diantaranya adalah; (1) Perbedaan menurut tujuan, (2) bentuk penyajian dan (3) fungsi metodologis model. Dua bentuk pokok dari model kebijakan adalah: (1) Model deskriptif dan (2) Model normative. Tujuan model deskriptif adalah menjelaskan dan atau meramalkan sebab dan akibat pilihan kebijakan, model kebijakan digunakan untuk memonitor hasil tindakan kebijakan misalnya penyampaian laporan tahunan tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan di lapangan.

William Dunn (1994) mengatakan kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kejelasan antara kebijakan dan kinerja implementasi yaitu:

- Standard dan sasaran kebijakan.
- Komunikasi antar organisasi dan pengukuran aktifitas
- Karakteristik organisasi komunikasi antar organisasi.
- Kondisi sosial, ekonomi dan politik
- Sumber daya
- Sikap pelaksanaan.

Selain itu Rippley dan Franklin (1982) menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan program dan ditinjau dari tiga faktor yaitu:

- a. **Perspektif** kepatuhan (*compliance*) yang mengukur implementasi dari kepatuhan *stake level burcancrats* terhadap atas mereka.
- b. **Keberhasilan** implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya personal.
- c. **Implementasi** yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerimaan manfaat yang diharapkan.

Factor-faktor yang mempengaruhi kinerja kebijakan selanjutnya dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Organisasi atau kelembagaan.
- b. Kemampuan politik dari penguasa

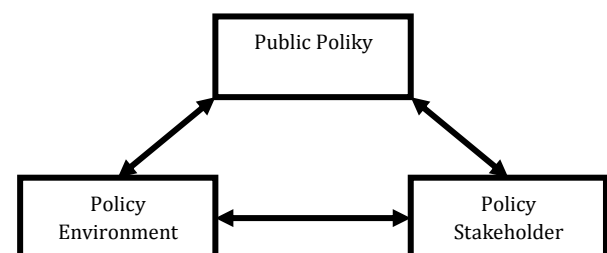
- c. Pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang
- d. Kebijakan pemerintah yang bersifat tak remental.
- e. Proses perumusan kebijakan pemerintah yang baik
- f. Aparatur evaluasi yang bersih dan berwibawa serta professional.
- g. Biaya untuk melakukan evaluasi.
- h. Tersedianya data dan informasi sosial ekonomi yang siap dimanfaatkan oleh penilai-penilai kebijakan.

Peters (1982) mengatakan, implementasi kebijakan yang gagal disebabkan beberapa factor:

- a. **Informasi** Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dari kebijakan itu.
- b. **Isi Keberhasilan** Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidak tepatan atau ketika tegasan intern ataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.
- c. **Dukungan** Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.
- d. **Pembagian Potensi** Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para actor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan diferensiasi tugas dan wewenang.

Sebagai suatu ringkasan untuk mempermudah pemahaman kerangka pemikiran dapat tersaji dalam bagian sebagai berikut. Proses implementasi kebijakan hendaknya melalui alur seperti dikemukakan oleh Dye (1981) sebagai berikut:

Kerangka analisis Kebijakan Publik

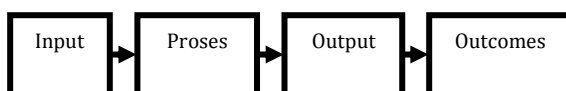


Sumber: Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, 3 th ed. (Englewood Cliffs, NJ; Prentice Hall, 1981)

Berdasarkan bagan / kerangka pemikiran dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti sebagai berikut :

- **Publik Policy**, merupakan rangkaian pilihan yang harus lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, diformulasikan di dalam bidang-bidang isu sejak pertahanan, energi, dan kesehatan sampai pendidikan, kesejahteraan, dan kejahatan. Pada salah satu bidang isu terdapat banyak isu kebijakan, yaitu serangkaian arah tindakan pemerintah yang actual ataupun yang potensial yang mengandung konflik diantara segmen-segmen yang ada dalam masyarakat.
- **Policy stakeholder**, yaitu para individu dan atau kelompok individu yang mempunyai andil di dalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Pelaku kebijakan misalnya kelompok warga Negara, perserikatan birokrasi partai politik, agen-agen pemerintah, pimpinan terpilih dan para analis kebijakan sering menangkap secara berbeda informasi yang sama mengenai lingkungan kebijakan.
- **Policy environment**, yaitu kointeks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuatan kebijakan dan kebijakan publik oleh karena itu, sistem kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis, yang berarti bahwa dimensi objektif dan subjektif dari pembuatan kebijakan tidak terpisahkan di dalam prakteknya. Sistem kebijakan adalah produk manusia yang subjektif yang diciptakan melalui pilihan-pilihan yang sadar oleh para pelaku kebijakan; sistem kebijakan adalah realitas objektif yang dimanifestasikan dalam tindakan-tindakan yang teramati berikut konsekuensinya; para pelaku kebijakan merupakan produk dari sistem kebijakan.

Kerangka Proses kebijakan Publik



1. **Input**, sumber daya-sumber daya yang digunakan sebagai ujung tombak dalam proses administrasi maupun organisasi pelaksana.

2. **Proses**, adalah proses interaksi antara actor yakni antara instansi terkait sebagai pelaksana dengan pengusaha dan masyarakat.
3. **Ouput**, yaitu keluaran yang dihasilkan langsung dari proses kebijakan tersebut.
4. **Out comes**, yaitu hasil yang diharapkan dimana akan memberikan tujuan kebijakan positif kepada Dinas Kominfo dan masyarakat sebagai penerima manfaat.

Sebagaimana penjelasan tersebut diatas mengenai berbagai teori yang berkaitan dengan implementasi suatu kebijakan publik, maka factor-factor yang mempengaruhi kinerja implementasi dipengaruhi oleh berbagai factor, baik factor kelembagaan, perilaku para stakeholders, pengelolaan program kebijakan (manajemen kebijakan publik), factor politik, factor sosial, dan factor ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Populasi dan Sampel sasaran pada penelitian ini adalah seluruh komponen (implementator) yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan Pusat Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Jumlah mereka yang terlibat sesuai dengan Surat keputusan kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Nomor : 900/30443/DKI/VI/2011, Tentang Susunan Panitia Pelaksanaan Pusat Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 27 orang tidak termasuk penanggung jawab. Teknik Pengumpulan menggunakan data primer (wawancara, kuesioner dan observasi) dan dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu data yang diperoleh telah diolah baik dalam bentuk angka maupun berupa uraian sesuatu hal yang berhubungan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan bahan informasi yang diperoleh dari instansi yang terkait dalam Implementasi Kebijakan Pusat Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisa data yaitu metode deskriptif.

PEMBAHASAN

Proses Kebijakan Pusat Informasi Publik

Proses Kebijakan, adalah proses interaksi antara aktor yakni komunikasi antara instansi terkait sebagai pelaksana dengan pengguna baik instansi pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Dalam implementasi Pusat Informasi Publik

pada Dinas Kominfo Propinsi Sumatera Utara, melibatkan seluruh kabupaten dan kota yang berjumlah 33 kabupaten dan kota se Sumatera Utara.

Arti penting Pusat Informasi Publik (*Media Center*) dalam kebijakan komunikasi dan informasi antara lain:

1. Pemenuhan Hak Tahu Publik

Melalui pengelolaan pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur komunikasi dan informatika, pengembangan dan penyediaan hardware/software, serta penyediaan konten informasi, diharapkan setiap warga negara dapat mengakses, memanfaatkan, dan berbagi informasi yang memungkinkan setiap individu, komunitas, dan masyarakat untuk mengembangkan potensi dan kualitas hidupnya agar lebih baik'

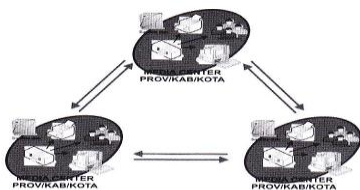
2. Akomodasi Aspirasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan

Keterlibatan publik menjadi prasyarat bagi terwujudnya pemerintahan yang baik. Agar keterlibatan publik bisa berlangsung optimal, dibutuhkan saluran komunikasi yang transparan dan efektif. Oleh karena itu, setiap lembaga negara wajib menyediakan sistem akses informasi dan komunikasi publik agar masyarakat memiliki kesempatan mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan, program, dan kegiatan lembaga negara'

3. Mendukung Terciptanya Citra Positif Lembaga Negara

Strategi dan perencanaan untuk membentuk pemahaman atau reputasi yang positif atas identitas dan kinerja lembaga negara dikalangan masyarakat sangat diperlukan agar keterlibatan publik semakin bernilai dan mampu mendukung sefiap kebijakan lembaga negara. Dengan terciptanya akses informasi bagi masyarakat secara cepat, tepat, akurat, dan murah, maka diharapkan informasi publik mudah diperoleh. Hal itu akan mendorong terbangunnya partisipasi masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan publik sehingga tercipta akuntabilitas penyelenggara negara.

Bagan Koordinasi Antar-Media Center



Media Center di daerah perlu saling berkoordinasi dengan Ditjen IKP Kemkominfo yang ditekankan pada peningkatan kapasitas

kelembagaan dan tata kelola Media Center. Dengan demikian, Ditjen IKP dan Media Center di daerah dapat saling berbagi informasi sehingga terwujud kesamaan acuan dan kerangka dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masing-masing Media Center. Upaya itu diarahkan untuk menyediakan personel dan waktu yang tepat untuk melaksanakan diseminasi dan pertukaran informasi yang diperlukan agar pelaksanaan pengelolaan Media Center bisa harmonis dan memenuhi tujuan yang telah ditentukan media Center menjadi salah satu sumber penyusunan strategi komunikasi dan informasi yang berasal dari partisipasi publik di daerah.

Posisi Media Center dalam Manajemen Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik adalah :

- a. Komunikasi publik yang baik harus didukung pengelolaan informasi publik yang handal yang mencakup proses dan prosedur lembaga negara dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan informasi yang perlu diketahui publik. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) Kementerian Kominfo terus berupaya mengembangkan Tata Kelola Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP).
- b. Strategi diseminasi lembaga negara dilakukan dengan menjalin kemitraan seluas mungkin dengan institusi yang berperan sebagai komunikator pendukung seperti Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), Media Center, Media Publik, Media Massa, dan mitra strategis lainnya dari kalangan organisasi masyarakat, dunia usaha, asosiasi, perguruan tinggi, dan kelompok informasi masyarakat.
- c. Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) dari Humas Kementerian/LPNK, Humas BUMN, dan humas pemerintah daerah.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pusat Informasi Publik

Faktor Politik

Dengan telah dilaksanakannya otonomi secara utuh sejak tahun 2001, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintah Daerah sebagai mana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kepada Daerah diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang-bidang yang berdasar Undang-Undang telah ditetapkan sebagai kewenangan Pusat.

Keleluasaan otonomi ini mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Pembagian kewenangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana pada dasarnya seluruh kewenangan ada di Daerah, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Secara rinci pembagian kewenangan antara Pusat dan Provinsi diatur dalam PP 25/2000, sedangkan kewenangan Kabupaten/Kota adalah seluruh kewenangan di luar yang telah menjadi kewenangan Pusat dan Provinsi. Kewenangan Pusat di luar 5 kewenangan yang tidak diserahkan adalah kewenangan yang bersifat perencanaan makro, penetapan pedoman, norma, kriteria, dan standar. Sementara kewenangan Provinsi adalah yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan.

Dengan desentralisasi ini, maka secara umum hal-hal yang berkaitan dengan stabilisasi dan distribusi dilakukan oleh Pemerintah yang tingkatannya lebih tinggi (Pemerintah Pusat), sementara fungsi alokasi akan lebih banyak dilaksanakan oleh Daerah, karena Daerah lebih dekat kepada masyarakat sehingga dapat diketahui prioritas dan kebutuhan masyarakat setempat.

Faktor Kelembagaan

Media center adalah pusat atau sarana pengelolaan komunikasi dan informasi berbasis teknologi atau berbasis internet (online) yang digunakan untuk menghimpun, mengolah, menyediakan, dan menyebarluaskan informasi provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota kepada masyarakat, serta menampung umpan balik dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Komponen Kelembagaan

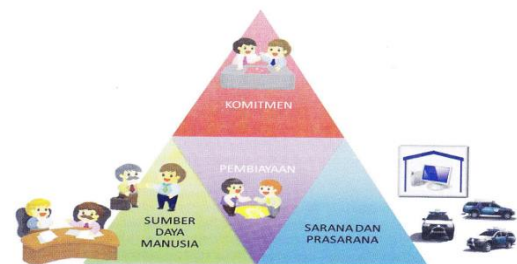
Persyaratan komponen kelembagaan Media Center terdiri dari:

1. Komitmen

- Komitmen pimpinan lembaga atau organisasi untuk menyediakan tempat, dana pendamping, sumberdaya manusia pengelola dan organisasi kerja.
- Komitmen pimpinan lembaga atau organisasi untuk melakukan pengamanan dan perawatan (maintenance) fasilitas Media Center.

- Komitmen pengelola untuk mempromosikan Media Center agar menarik pengguna.
2. Standar Minimalsarana dan prasarana
 - Ruang yang memadai.
 - Letak ruangan/gedung mudah dijangkau oleh pengguna.
 - Akses/koneksi dengan jaringan internet.
 - Penambahan sarana perangkat keras dan perangkat lunak sesuai kebutuhan pengguna.
 3. Standar Minimal Sumber Daya Manusia Pengelola
 - Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan media informasi.
 - Memiliki kompetensi mengembangkan jejaring komunikasi sosial.
 - Memiliki kemampuan analisis kebutuhan informasi masyarakat
 - Memiliki kompetensi bidang teknologi komunikasi dan informatika.
 4. Pembiayaan
 - pembiayaan Media center dapat diperoleh/bersumber dari:
 - Dana APBN dan/atau APBD yang sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
 - Kerjasama dengan pihak swasta/dunia usaha'
 - Pengembangan partisipasi masyarakat sebagai mitra kerjasama.

Dampak dari otonomi daerah terhadap implementasi Pusat Informasi Publik adalah terjadinya perubahan kelembagaan dalam pengelolaan informasi. Sebelum diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, pengelolaan informasi berada di bawah departemen Penerangan dan pada Tingkat Provinsi dilakukan oleh Kawil departemen Penerangan, namun setelah otonomi kelembagaan pusat di daerah (Kanwil) di tiadakan dan pengelolaan informasi sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan oleh SKPD, baik berupa dinas, badan atau kantor.



Bagan Komponen Kelembagaan

Faktor Perkembangan Teknologi

Dalam pelaksanaan serta tindak lanjut pembangunan dan pengembangan Pusat Informasi Publik dalam era otonomi daerah, isu strategis yang memerlukan perhatian antara lain meliputi aspek-aspek:

1. Perawatan dan pengembangan perangkat keras

Memelihara dan mendayagunakan secara efektif perangkat keras yang sudah dimiliki, baik berupa Server, Jaringan komunikasi serta PC Client yang ada di Pusat Data serta yang dipergunakan oleh para pejabat Struktural di Pusat. Memberikan bimbingan dan bantuan teknis untuk pendayagunaan Server pada setiap Provinsi dan PC Client yang ada di tingkat Kabupaten/Kota untuk dapat dipergunakan secara efektif dalam kegiatan pengolahan data. Meningkatkan fungsi jaringan komunikasi data yang senantiasa on-line ditingkat Pusat dan off line ditingkat Provinsi dan setiap Kabupaten/Kota. Mendorong dan mendayagunakan potensi daerah untuk pengadaan perangkat keras dalam rangka pendayagunaan database keluarga bagi pembangunan di daerah.

2. Pengembangan program aplikasi dan perangkat lunak

Dalam pengembangan program aplikasi dan perangkat lunak dilaksanakan dan mengembangkan program-program aplikasi yang mendukung kebutuhan komponen diantaranya adalah pelaksanaan pengolahan sistem pelaporan dan statistic, program pengolahan data kepegawaian, program pengolahan data logistic dan kebutuhan program aplikasi dari komponen-komponen yang memerlukan. Memelihara dan mengembangkan sesuai kebutuhan dari program aplikasi dan perangkat lunak yang sudah ada berupa program aplikasi yang diperoleh dari IBM diantaranya pengolahan database keluarga, sistem informasi eksekutif dengan menggunakan Business Object dan Web Intellegence. Meningkatkan pendayagunaan email dengan menggunakan lotus notes serta mengintegrasikan dalam Web Site untuk menampung kebutuhan email address daerah yang tidak berlangganan dengan ISP. Mengembangkan program-program aplikasi yang mendukung desentralisasi pengolahan data baik di tingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota.

Disamping aspek-aspek pokok tersebut, kegiatan yang dilaksanakan sudah diarahkan untuk mendukung dan melaksakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, tanggal 9 Juni 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government.

Dalam Inpres tersebut pada hakekatnya mengisyaratkan agar pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-government. Melalui proses transformasi tersebut, diarahkan agar pemerintah dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.

Dengan demikian seluruh lembaga-lembaga negara, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal. Oleh karena itu komitmen yang kuat dari pimpinan instansi pemerintah diperlukan agar proses transformasi menuju e-government dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

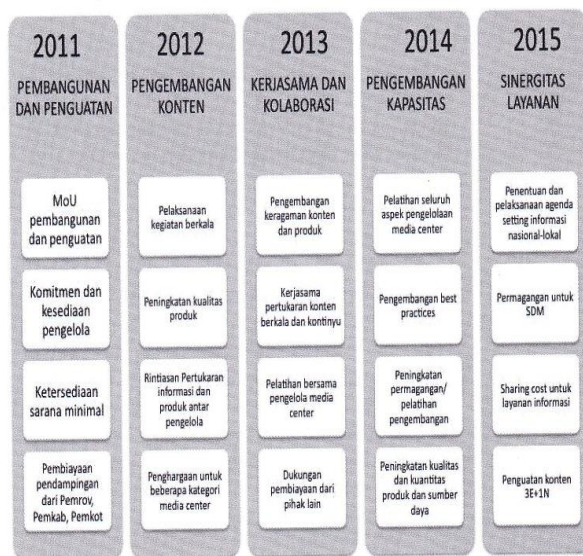
Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam konteks ini pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup dua aktivitas yang berkaitan yaitu (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik; serta (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam tatakerja internal secara interaktif serta efisien. Selanjutnya secara eksternal agar pelayanan publik dapat diakses dengan mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Untuk melaksanakan maksud tersebut pengelolaan data dan sistem informasi diarahkan untuk pengembangan e-government untuk mencapai tujuan antara lain adalah :

- Pendayagunaan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat (on-line) dan tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional

- Berperan serta untuk mendukung pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi antar lembaga-lembaga negara negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
- Mempersiapkan dukungan untuk pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta menperlancar akses informasi untuk kepentingan publik dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Dalam Roadmap yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (2011) dijelaskan bahwa Roadmap merupakan penjabaran upaya untuk mencapai target dalam *grand design*. (Pedoman Umum Media Center) Jabaran dibuat dalam bentuk tahapan/time frame (kerangka waktu) yang dapat menunjukkan kemajuan yang telah dicapai, posisi sekarang, dan proyeksi yang akan datang. Roadmap Media Center dirancang berdasarkan pentahapan pembangunan, penguatan, kerjasama, pengembangan kapasitas dan sinergitas layanan informasi. Masing-masing tahapan tersebut akan dirinci dalam komponen kebijakan (komitmen), sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pembiayaan dan kegiatan operasional dalam bentuk bagan sebagaimana berikut:



Secara umum pentahapan dalam roadmap dapat disesuaikan dengan kondisi lokal geografis dan akses jaringan serta kebutuhan layanan informasi melalui Media Cente; berdasarkan prioritas kawasan perbatasan, terpencil dan terdepan serta daerah rawan konflik. Penghargaan (reward) terhadap para pengelola Media Center sebagai upaya untuk

meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada publik perlu dirintis mulai tahun 2012 dan terus ditingkatkan secara bertahap sesuai kebutuhan.

Media center berfungsi untuk meningkatkan aksesibilitas informasi publik secara vertikal, horizontal, dan diagonal. Tugas utama Media center sebagai pusat perayanan rnmunikasi dan Komunikasi publik adalah menjadi center of excerence merarui pora pendekatan sinergis dan koordinatif antar-Media center dalam pengadaan infrastruktur konten, sarana, dan prasarana.

Media Center juga diarahkan sebagai lembaga penyedia, pengolah, dan penyebarluasan informasi yang dibentuk, dan difasilitasi oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan maksud untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Sebagai sebuah bentuk pelayanan terhadap publik, Media center menyediakan wahana pembelajaran bagi publik guna mengembangkan partisipasi mereka dalam proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dengan adanya dukungan informasi yang memadai.

Keberhasilan pengelolaan Media center itu pada akhirnya sangat tergantung pada komitmen para pihak/pemangku kebijakan dalam bentuk adanya kewenangan/legalitas, akses/koordinasi, SDM cukup dan cakap, serta sarana dan prasarana yang memadai.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan tentang Implementasi Kebijakan Pusat Informasi Publik pada Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

- 1) Implementasi Kebijakan Pusat Informasi Publik pada Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara dilihat dari input, proses, output dan out comes kebijakan Pusat Informasi Publik, secara umum telah berjalan dengan baik, namun apabila dilihat dari masing-masing variabel kebijakan menunjukkan adanya perbedaan dalam keberhasilan implementasi Pusat Informasi Publik tersebut .
 - a) Dilihat dari **Input**, yaitu sumber daya sumber daya yang digunakan dalam implementasi Pusat Informasi Publik (SDM, teknologi, keuangan, sarana dan prasarana) sebagai ujung tombak dalam proses administrasi maupun organisasi pelaksana belum memadai.

- b) Dilihat dari **Proses**, masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antara aktor yakni komunikasi terutama antar instansi terkait sebagai pelaksana dengan pengguna baik instansi pemerintah kabupaten/kota, pengusaha dan masyarakat.
- c) Dilihat dari **Output**, yaitu keluaran yang dihasilkan langsung dari proses kebijakan Pusat Informasi Publik, baru berupa pelayanan informasi yang bersifat : publish, belum dapat bersifat interaksi dan transaksi.
- d) Dilihat dari **Out comes**, yaitu hasil yang diharapkan telah memberikan manfaat terutama dalam memfasilitasi dan menyajikan bahan-bahan yang diperoleh dari Devisi News Room, Devisi Audio Visual, Devisi Media On-line dan Devisi Media Cetak kepada masyarakat pengguna.
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi Kebijakan Pusat Informasi Publik pada Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara adalah faktor politik, kelembagaan dan perkembangan teknologi. Dengan adanya kebijakan desentralisasi, maka pengelolaan informasi publik telah mengalami pergeseran dari pusat kepada daerah, yang secara nyata berdampak terhadap kelembagaan dalam pengelolaan informasi di daerah. Perkembangan teknologi telah membawa kemajuan utama dalam pengolahan dan transfer data, telekomunikasi, *paperless office*, automasi proses produksi/kerja dan media elektronik.
- Saran-Saran**
Untuk lebih meningkatkan tingkat keberhasilan Implementasi Kebijakan Pusat Informasi Publik pada Dinas Kominfo Propinsi Sumatera Utara, maka :
1. Perlu dilakukan berbagai upaya dan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terutama dalam era otonomi adalah dukungan dana, tenaga dan sarana dalam penyebaran informasi publik yang masih sangat kurang.
 2. Sosialisasi tentang keberadaan Pusat Informasi Publik (*Media Centre*) masih perlu dilakukan kepada semua pihak di berbagai tingkatan wilayah melalui media elektronik maupun media masa lainnya..

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin, 1997, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke*

Implementasi kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.

Arifin, Anwar, 1988, *Ilmu Komunikasi*, LKII, Ujung Pandang.

Brinkerhoff, Derick W- Benjamin L. Crosby, 2002, *Managing Policy Reform*, Kumarian Press, USA.

Dunn, William N., 2003, Penerjemah Samodra Wibawa dkk., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press.

Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.

Edwards III, George C., 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Inc., United States of America.

Fisher, B. Aubrey, 1986, *Teori-Teori Komunikasi : Perspektif Mekanistik, Psikologis, Interaksional, dan Pragmatis*, Remadja karya CV., Bandung.

Islamy, M.Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Jogiyanto HM., 2001, *Analisis dan Disain*, Andi, Yogyakarta.

Judisseno, Rinsky K., 1999, *Pajak dan Strategi Bisnis : Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, 1984, *Qualitative Data Analysis*, Sage publication Inc, USA.

Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.

Mardiasmo, 2003, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta.

Moleong, Lexy J., 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Oxford, 1995, *Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press

Simanjuntak, Payaman J., 1985, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

- Prawiro, Ruslan H., 1980, *Ekonomi Sumber Daya*, Alumni, Bandung
- Rachmadi, F., 1996, *Public Relations Dalam Teori dan Praktek*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Ripley, Randall B., 1985, *Policy Analysis in Political Science*, Nelson-Hall Inc., Chicago.
- Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Van Meter, Donald S., and Carl E Van Horn, 1975, *Administration & Society : The Policy Implementation Process A Conceptual Framework*, Sage Publications Inc., Ohio.
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Winardi, 1983, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, Tarsito, Bandung.
- Wibawa, Samudra, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.